

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
STUNTING PADA BALAI PENYULUH KB KECAMATAN
AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

SITI NORJANAH

NPM: 2022051

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

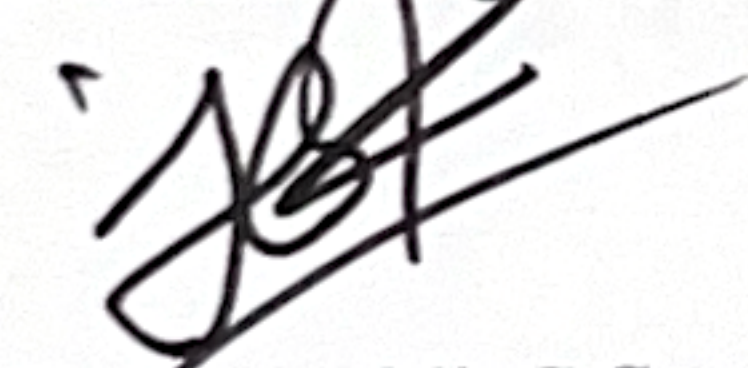
NAMA : SITI NORJANAH

NPM : 2022051

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS REMAJA PUTRI TINGKAT SMA DI KELURAHAN SUNGAI MALANG setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,



Dr. Jumaidi, S.Sos, M.AP.
NUPTK. 4752766667131062

Amuntai, 04 Februari 2026

Pembimbing II,



Anita Rahmayanti, S.Sos, M.A.P
NUPTK. 1253770671230293

Mengetahui

Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik,



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, maupun secara praktis dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Tipe Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	42
E. Desain Operasional Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknis Analisis Data	46
H. Uji Kredibilitas Data	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Desain Operasional Penelitian	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	40
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif. Salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan adalah status gizi masyarakat, khususnya pada anak balita. Namun, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah gizi kronis yang cukup serius, yaitu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial terutama dalam seribu hari pertama kehidupan (HPK). Dampak stunting sangat luas, tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga berpotensi menurunkan daya saing bangsa.

Secara global, data UNICEF (2021) menunjukkan sekitar 149 juta balita mengalami stunting, sebagian besar berada di negara berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah. Indonesia sendiri termasuk negara dengan angka stunting yang tinggi. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting pada balita tahun 2019 sebesar 27,7%, menurun menjadi 24,4% pada 2021, dan kembali turun menjadi 21,6% pada 2022. Meskipun terdapat penurunan, angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Pemerintah menargetkan

prevalensi stunting dapat ditekan hingga 14% pada tahun 2024 melalui berbagai program intervensi nasional.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, prevalensi stunting masih cukup tinggi. Data SSGI 2022 mencatat angka 24,6%, yang menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. Hal ini menjadi perhatian khusus karena stunting tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan masalah stunting yang lebih kompleks. Pada tahun 2022 prevalensi stunting tercatat sekitar 28%, dan sempat meningkat menjadi 36% pada 2024. Lonjakan ini memperlihatkan masih adanya kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Namun, berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan laporan terakhir, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 27,6%, artinya terdapat penurunan sebesar 8,4% dalam satu tahun. Meski demikian, angka ini masih cukup tinggi dibandingkan target nasional. Selain itu, data Dinas Kesehatan HSU Februari 2023 mencatat terdapat 2.693 balita dari 13.639 balita yang mengalami stunting, atau sekitar 19,77%.

Faktor penyebab stunting di HSU sangat beragam, antara lain rendahnya tingkat pendapatan keluarga, pola konsumsi yang tidak bergizi seimbang, akses layanan kesehatan dan sanitasi yang masih terbatas, budaya perkawinan usia dini, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola asuh anak yang tepat. Kompleksitas faktor tersebut

menuntut adanya kebijakan yang terintegrasi dan implementasi yang efektif di tingkat lokal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan prevalensi stunting, baik melalui kebijakan nasional maupun intervensi daerah. Beberapa langkah strategis antara lain:

1. Menetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
3. Melaksanakan program intervensi gizi spesifik (ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan balita).
4. Mengintegrasikan intervensi gizi sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi gizi, serta pendewasaan usia perkawinan).
5. Menetapkan lokus stunting di berbagai daerah, termasuk Hulu Sungai Utara, untuk intervensi yang lebih fokus.
6. Melibatkan peran Balai Penyuluh KB sebagai ujung tombak edukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, pola asuh, dan pencegahan stunting.
7. Menggerakkan program inovasi daerah seperti HSU Ceria, Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), serta kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program “Mahasiswa Peduli Stunting”.

Secara khusus, Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan

penanggulangan stunting. Lembaga ini tidak hanya menjadi pusat edukasi bagi masyarakat mengenai kesehatan keluarga dan gizi anak, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan program lintas sektor di tingkat kecamatan.

Meski demikian dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah sering kali menghadapi berbagai hambatan, berdasarkan observasi awal yang penulis temukan yaitu:

1. Keterbatasan tenaga penyuluh sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program dilapangan, ketika jumlah penyuluh tidak sebanding dengan luas wilayah binaan atau jumlah sasaran menyebabkan kegiatan pendampingan tidak berjalan optimal. Kondisi ini membuat intensitas penyuluhan menurun sehingga informasi maupun program yang disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya terserap dengan baik.
2. Koordinasi antar instansi belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih kegiatan, perbedaan prioritas kebijakan, hingga keterlambatan pelaksanaan program di lapangan. Lemahnya komunikasi antar instansi juga berdampak pada kurangnya sinkronisasi data dan informasi, sehingga arah kebijakan tidak sejalan.
3. Partisipasi masyarakat dalam program sering kali masih rendah karena adanya nilai, norma dan kebiasaan lokal yang kurang sejalan dengan tujuan program, ketika program dianggap tidak sesuai dengan budaya yang sudah mengakar maka akan timbul penolakan, hal ini membuat

masyarakat kurang terlibat secara aktif, baik dalam kegiatan penyuluhan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan hasil program.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Dwiyanto Indiahono, 2017: 31-34) Implementasi kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang serta fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi?
3. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan stunting yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah, ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah..

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik terkait implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting, terutama pada level pelaksana di lapangan melalui peran Balai Penyuluh KB. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, di antaranya:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan maupun strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan stunting, khususnya melalui penguatan peran Balai Penyuluh KB di tingkat kecamatan.

b. Bagi Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program, sehingga ke depan dapat meningkatkan kualitas penyuluhan, pendampingan keluarga, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan angka stunting.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencegahan stunting, khususnya terkait pola asuh anak, pemenuhan gizi, serta penerapan perilaku hidup sehat.

d. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penelitian lapangan, sekaligus memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program studi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting, banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan kajian di berbagai daerah dengan sudut pandang berbeda. Kajian tersebut menjadi rujukan penting sekaligus pembanding untuk penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. **Dini Febrian Anggreini. 2025. “Upaya Balai Keluarga Berencana dalam Mendampingi Keluarga Anak Stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates”**. Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022, yaitu mencapai 34,9%. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2021 prevalensi balita di Kabupaten Jember sebesar 23,9%. Kemudian di Jember terdapat 11 Puskesmas yang memiliki angka stunting di atas 10%. Puskesmas Kaliwates masuk dalam 11 puskesmas dengan angka stunting di atas 10%. Menurut data dari petugas Balai Keluarga Berencana menunjukkan kondisi stunting di Kelurahan Mangli ini lebih kepada kurangnya gizi dan pertumbuhan fisik anak, yang mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Adapun fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : 1) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates? 2) Bagaimana upaya yang diberikan oleh Balai Keluarga

Berencana dalam Mendampingi anak stunting di Kelurahan Mangli? Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui terkait apa saja yang mempengaruhi terjadinya anak stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates. 2) untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Balai Keluarga Berencana dalam mendampingi anak stunting di Kelurahan Kaliwates. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates diantaranya ialah faktor ekonomi yang kurang mendukung, faktor pola asuh yang kurang tepat, faktor kurangnya asupan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak balita. Kemudian upaya yang dilakukan Balai Keluarga Berencana dalam mendampingi anak stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates yaitu dengan memberikan edukasi kepada keluarga, kemudian pemberian makanan tambahan, dan kemudian memberikan layanan bimbingan kepada keluarga.

2. **Nadia. 2023. “Implementasi Penanggulangan Stunting di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *Purposive sampling* informan berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup baik hal tersebut dapat dilihat pada: a) Kemampuan Organisasi dilihat pada indikator kemampuan cukup baik, para kader posyandu bersama bidan desanya sudah mempunyai kemampuan, dan koordinasi cukup baik, puskesmas dan posyandu memantau pertumbuhan balita 1, dan indikator SOP belum baik, karena terlalu banyakdan berbelit-belit. b) Informasi lihat pada indikator informasi atau sosialisasi cukup baik, pelaksanaan sosialisasi rutin dilaksanakan dikegiatan posyandu setiap sebulan sekali, dan indikator penyampaian informasi stunting cukup baik, penyampaian informasi stunting di Puskesmas dengan menempel beberapa poster yang berkenaan dengan stunting sedangkan di Desa Kapar dengan sosialisasi langsung, pemasangan spanduk stunting, buku stunting. c) Dukungan dilihat pada indikator sikap masyarakat cukup baik, dan indikator kepatuhan masyarakat belum baik, karena sebagian orang tua masih ada yang memberi makan anaknya sembarangan karena tidak punya biaya. d) Pembagian Potensi dilihat pada indikator pembagian wewenang cukup baik, struktur organisasinya berupa Taman Posyandu di setiap desa, dan indikator komitmen petugas dalam pencegahan stunting sudah bagus dilihat dari jadwal wajib masalah stunting setiap bulan biasanya akhir bulan sekitar tanggal 1-10 diadakan

di posyandu masing-masing desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung: Banyaknya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan perbaikan gizi. Adapun faktor penghambat terdiri dari: Pendidikan orang tua rata-rata tergolong rendah dan faktor ekonomi

3. **Ananda. 2023. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting melalui Balai Penyuluh KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.**

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya standar kebijakan, komunikasi antarorganisasi, sumber daya, serta kondisi lingkungan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Penyuluh KB memiliki peran sentral dalam sosialisasi program, pendampingan keluarga, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Namun, permasalahan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, minimnya sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa lembaga penyuluhan keluarga berencana dapat menjadi motor penggerak kebijakan penanggulangan stunting, meskipun tetap menghadapi kendala sumber daya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Definisi ini menekankan bahwa implementasi merupakan tahap penting yang menjembatani antara

gagasan dan kenyataan, antara konsep abstrak dengan realitas yang dapat diukur hasilnya. Dengan kata lain implementasi tahapan esensial yang menentukan apakah suatu ide, kebijakan atau program dapat berjalan efektif atau justru berhenti sebagai rencana tanpa hasil.

Implementasi juga dapat dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah rencana. Perencanaan yang baik sekalipun akan menjadi tidak berarti apabila implementasinya lemah. Sebaliknya, implementasi yang efektif mampu mengoptimalkan rencana yang efektif mampu mengoptimalkan rencana yang sederhana menjadi hasil yang besar. Oleh karena itu, tahap implementasi sering disebut tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan proses manajemen, program, maupun kegiatan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2017) implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Senada dengan hal tersebut, Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2016) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berupa undang-undang, yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, serta penyusunan struktur implementasi.

Lebih lanjut, Grindle (dalam Winarno, 2017) menekankan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, dengan fokus pada apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dijalankan. Pandangan ini

menegaskan bahwa implementasi tidak hanya sebatas intruksi, melainkan juga mencakup hasil nyata di lapangan.

Pressman dan Wildavsky (dalam Wahab, 2017) memandang implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan untuk mrncapainya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Subarsono (2015:90), implementasi merupakan proses yang kompleks karena menyangkut interaksi antara tujuan program dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Implementasi dapat dianggap berhasil jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal yang telah dirumuskan.

Selanjutnya, Agustino (2017:134) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah digariskan dalam keputusan atau perencanaan.

Sementara itu, Wahab (2016:72) menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan suatu proses yang membutuhkan strategi, komunikasi, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai dinamika lingkungan.

Implementasi tidak hanya sebatas melaksanakan instruksi, tetapi juga mencakup bagaimana instruksi tersebut diterjemahkan, diorganisasikan, dan dipraktikkan sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, implementasi adalah upaya menghubungkan dunia ide dengan realitas sosial.

Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses penyelenggaraan suatu program karena pada tahap ini gagasan yang sebelumnya hanya tertuang dalam bentuk konsep, kebijakan, atau rencana, benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, implementasi selalu ditandai oleh adanya aktivitas yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Implementasi bukan sekadar aktivitas administratif yang statis, melainkan proses yang bersifat dinamis, berlangsung terus-menerus, dan melibatkan banyak aktor dengan peran yang berbeda. Tanpa adanya tindakan konkret, maka suatu rencana tidak bisa disebut telah diimplementasikan, melainkan masih berada pada tataran ide atau perencanaan.

Lebih jauh, implementasi juga dicirikan oleh adanya keterlibatan berbagai pihak. Tidak ada implementasi yang berjalan hanya dengan satu aktor saja. Dalam praktiknya, implementasi selalu melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan, aparatur pelaksana di tingkat teknis, organisasi atau lembaga yang mendukung, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan kata lain, implementasi adalah proses sosial yang diwarnai interaksi antaraktor dengan kepentingan, persepsi, dan kapasitas yang berbeda. Keterlibatan banyak pihak ini membuat implementasi seringkali bersifat kompleks, sehingga memerlukan koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme komunikasi yang jelas.

Selain itu, ciri penting lain dari implementasi adalah adanya pemanfaatan sumber daya. Implementasi tidak dapat berlangsung hanya dengan kemauan politik atau kebijakan tertulis, melainkan harus ditopang

oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan program sering terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi ciri khas yang selalu menyertai implementasi.

Implementasi juga memiliki karakter dinamis. Artinya, implementasi tidak berlangsung dalam ruang yang steril, melainkan berada dalam konteks sosial tertentu yang sarat dengan dinamika. Faktor lingkungan sosial, budaya masyarakat, kondisi politik, bahkan perubahan situasi ekonomi dapat memengaruhi jalannya implementasi. Inilah yang membuat implementasi harus selalu adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta fleksibel dalam menghadapi hambatan. Sifat adaptif ini menjadi pembeda antara implementasi yang berhasil dan yang gagal, sebab implementasi yang kaku dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan biasanya sulit mencapai hasil optimal.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:22) menjelaskan bahwa implementasi dicirikan oleh keterhubungan antara keputusan yang dirumuskan dengan tindakan di lapangan. Artinya, implementasi adalah jembatan yang menghubungkan antara rumusan kebijakan dengan realitas pelaksanaan. Dalam jembatan ini, terdapat keterlibatan birokrasi sebagai pelaksana utama, aparat teknis yang bertugas di lapangan, serta masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek implementasi.

Syahrudin (2019:48) menambahkan bahwa implementasi bersifat adaptif, yaitu selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga tidak berjalan secara kaku. Ia menekankan bahwa implementasi yang baik mampu bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan, sehingga pelaksanaan program tetap relevan dan tidak kehilangan arah meskipun menghadapi perubahan situasi.

Rodiyah (2022:61) menegaskan bahwa implementasi yang efektif ditandai dengan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pekerjaan birokrasi, tetapi proses kolaboratif. Koordinasi lintas sektor penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan peran antarinstansi, sedangkan partisipasi masyarakat memastikan bahwa implementasi program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirangkum bahwa ciri utama implementasi meliputi:

- a. Adanya tindakan nyata yang dapat diamati, bukan hanya berupa rencana atau dokumen.
- b. Keterlibatan berbagai aktor dan sumber daya yang menjadi penopang keberlangsungan program.
- c. Sifatnya yang dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.
- d. Adanya koordinasi dan partisipasi, baik antarinstansi pelaksana maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

Implementasi tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini menentukan apakah implementasi dapat berjalan efektif atau justru menghadapi hambatan. Secara umum, faktor utama yang memengaruhi implementasi meliputi sumber daya manusia, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur organisasi. Keempat aspek ini menjadi landasan dalam menilai kualitas implementasi di lapangan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:25), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik tenaga manusia, dana, maupun sarana pendukung. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu menjalankan program sesuai perencanaan, sementara dukungan anggaran dan fasilitas memadai menjadi pendorong

kelancaran kegiatan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, program sulit dijalankan secara optimal meskipun telah direncanakan dengan baik.

Selain sumber daya, komunikasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Syahrudin (2019:52) menegaskan bahwa komunikasi antaraktor sangat menentukan, sebab informasi yang jelas dan dipahami oleh pelaksana akan mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup penyampaian instruksi dari atasan ke bawahan, tetapi juga keterbukaan saluran komunikasi dua arah sehingga pelaksana dapat memberikan umpan balik dan laporan hambatan di lapangan.

Faktor berikutnya adalah disposisi atau sikap pelaksana. Rodiyah dkk. (2022:64) menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana, karena meskipun sumber daya mencukupi, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana tidak memiliki kemauan, kepedulian, dan integritas dalam bekerja. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana mendukung tujuan program, memiliki tanggung jawab moral, serta kesediaan untuk bekerja sesuai prosedur. Komitmen yang kuat dari pelaksana akan memperbesar peluang keberhasilan implementasi. Selain itu, struktur organisasi juga berpengaruh besar terhadap jalannya implementasi. Struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta prosedur yang sederhana akan mempercepat proses pelaksanaan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang rumit, hierarki terlalu panjang, dan mekanisme berbelit justru memperlambat pencapaian hasil. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan organisasi yang efektif, dengan sistem koordinasi dan pengawasan yang memadai.

Menurut George C. Edward III dalam Dwiyanto Indiahono (2017: 31–34), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat sub variabel utama, yaitu:

- a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana isi kebijakan disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.
- b. Sumber Daya
Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, maupun kewenangan yang jelas.
- c. Disposisi Pelaksana
Mengacu pada sikap, komitmen, serta keseriusan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dukungan dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi.
- d. Struktur Birokrasi
Birokrasi yang efektif memerlukan SOP yang jelas, koordinasi yang baik, serta pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh keterpaduan antara ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi, komitmen pelaksana, dan dukungan struktur organisasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk dasar penting dalam menilai sejauh mana implementasi dapat dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan

Kebijakan dipahami sebagai seperangkat keputusan yang dibuat oleh otoritas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Keberadaan kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan tindakan kolektif agar suatu masalah dapat diatasi secara sistematis. Kebijakan bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan juga merupakan strategi dan arah tindakan yang memberi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi lebih luas lagi mencakup proses perumusan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan selalu berkaitan erat dengan kepentingan publik, karena sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan menjadi jembatan antara gagasan ideal pemerintah dengan tindakan nyata yang diwujudkan melalui program, peraturan, maupun pelayanan publik.

Menurut Winarno (2015:23), kebijakan merupakan arah tindakan yang secara sengaja ditetapkan oleh aktor atau kelompok aktor dalam rangka mengatasi suatu permasalahan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan spontan, melainkan hasil dari

pertimbangan rasional untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Dunn (2018:60) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah untuk memengaruhi masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bisa berbentuk tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, sepanjang tujuannya diarahkan pada kepentingan publik.

Selanjutnya, Nugroho (2017:78) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan produk politik yang lahir dari proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya, kebijakan bukanlah sesuatu yang muncul secara sepihak, melainkan hasil dari dialektika antara kepentingan negara dan aspirasi warga. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan merupakan hasil keputusan yang dibuat secara sadar, sistematis, dan terencana oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk menyelesaikan persoalan publik melalui tindakan nyata. Kebijakan bukan hanya menekankan aspek formalitas, melainkan juga mencerminkan proses politik, sosial, dan administrasi yang kompleks dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang menghubungkan antara gagasan normatif dengan implementasi praktis di lapangan. Artinya, kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diwujudkan melalui program, kegiatan, maupun regulasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan publik, memberikan solusi terhadap permasalahan, serta

menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebijakan sebagai suatu produk keputusan publik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari keputusan pribadi atau organisasi biasa. Ciri-ciri kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan memiliki dimensi formal, substantif, dan implementatif yang melekat, sehingga keberadaannya dapat diidentifikasi secara jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Winarno (2015:29), kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dikeluarkan oleh aktor atau lembaga yang memiliki kewenangan formal, seperti pemerintah atau lembaga negara.
- b. Ditujukan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan publik, sehingga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- c. Memiliki sifat mengikat serta harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan selalu lahir dari otoritas yang sah dan memiliki daya paksa tertentu.

Sementara itu, Nugroho (2017:83) menyebutkan bahwa kebijakan publik ditandai oleh tiga hal utama, yaitu adanya tujuan yang jelas, adanya instrumen atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta adanya kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat. Dengan kata lain, kebijakan tidak hanya berhenti pada pernyataan niat, melainkan harus mengandung arah tindakan dan rencana operasional yang dapat dijalankan di lapangan.

Lebih lanjut, Subarsono (2016:21) menguraikan bahwa ciri khas kebijakan publik antara lain:

- a. dibuat melalui suatu proses politik dan administratif
- b. berlaku secara umum dan menyangkut orang banyak
- c. bersifat mengikat karena didukung oleh kewenangan negara
- d. membawa konsekuensi tertentu, baik berupa sanksi maupun perubahan sosial. Dari penjelasan ini terlihat bahwa kebijakan selalu terkait dengan dinamika politik dan birokrasi, sehingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi berbagai kepentingan.

Selain itu, Dunn (2018:64) menegaskan bahwa kebijakan dapat dikenali melalui cirinya yang berupa pilihan tindakan yang konsisten dan berkesinambungan, bukan keputusan yang bersifat insidental. Artinya,

kebijakan memiliki kesinambungan dalam jangka waktu tertentu, karena ditujukan untuk mencapai hasil yang lebih luas daripada kepentingan jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan setidaknya meliputi lima hal pokok, yaitu:

- a. Dibuat oleh otoritas yang sah, kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan formal.
- b. Ditujukan untuk kepentingan publik, kebijakan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok semata.
- c. Mengandung tujuan dan strategi kebijakan selalu dirancang dengan tujuan tertentu serta instrumen atau langkah untuk mencapainya.
- d. Bersifat mengikat dan membawa konsekuensi, setiap pihak yang terkait wajib mematuhi kebijakan, dan ada sanksi jika dilanggar.
- e. Merupakan hasil proses politik dan administratif, kebijakan lahir dari interaksi berbagai aktor dalam sistem pemerintahan yang kompleks.

Dengan demikian, ciri-ciri kebijakan tidak hanya memberikan batasan konseptual, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu keputusan pemerintah dapat benar-benar dikategorikan sebagai kebijakan publik atau sekadar keputusan administratif biasa. Pemahaman terhadap ciri-ciri ini penting agar penelitian mengenai kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan penanggulangan stunting, dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini karena hanya kebijakan yang memenuhi karakteristik tersebut yang dapat menjadi instrumen efektif

dalam mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik tidak lahir dan berjalan dalam ruang yang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini menentukan apakah kebijakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik atau justru mengalami hambatan. Pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan menjadi penting agar proses perumusan hingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Winarno (2015:41), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kebijakan publik, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Faktor sosial mencakup dinamika masyarakat, termasuk kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi warga. Faktor ekonomi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya, baik dana maupun sarana prasarana, sedangkan faktor politik berkaitan dengan kekuatan aktor-aktor politik dan bagaimana mereka memengaruhi arah kebijakan.

Subarsono (2016:28) menambahkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor birokrasi, khususnya struktur organisasi dan mekanisme kerja aparatur. Jika birokrasi terlalu panjang dan prosedural, kebijakan akan sulit diimplementasikan secara cepat. Namun, jika birokrasi efisien, kebijakan dapat dijalankan lebih efektif.

Sementara itu, Nugroho (2017:95) menekankan pentingnya faktor komunikasi dan koordinasi antaraktor. Kebijakan akan lebih mudah terlaksana apabila terdapat komunikasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang memadai, kebijakan sering kali mengalami salah tafsir sehingga implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awal.

Lebih lanjut, Dunn (2018:70) menjelaskan bahwa faktor lingkungan eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta kondisi internasional juga dapat memengaruhi kebijakan publik. Misalnya, kebijakan kesehatan atau pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan standar global dan kemajuan teknologi yang mengubah cara pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan meliputi:

- a. Faktor sosial, ekonomi, dan politik, yang mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kepentingan politik.
- b. Faktor birokrasi dan kelembagaan, yaitu struktur organisasi dan mekanisme aparatur yang melaksanakan kebijakan.
- c. Faktor komunikasi dan koordinasi, yang berhubungan dengan kejelasan informasi, hubungan antaraktor, serta partisipasi masyarakat.
- d. Faktor lingkungan eksternal, seperti pengaruh globalisasi, teknologi, dan kondisi internasional yang tidak bisa diabaikan.

Kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, birokrasi, komunikasi, hingga kondisi lingkungan global menjadi determinan penting yang menentukan kualitas perumusan maupun keberhasilan implementasi kebijakan. Artinya, kebijakan yang baik bukan hanya dilihat dari kualitas dokumen atau rancangan program, melainkan juga dari sejauh mana pembuat kebijakan mampu memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhinya. Semakin tepat pengelolaan faktor-faktor tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses yang panjang dan sistematis. Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berbagai aktor lain seperti birokrasi, masyarakat, kelompok kepentingan, hingga lembaga internasional. Karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai sebuah siklus, di mana setiap tahap saling terkait dan memengaruhi keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.

Menurut Dunn (2018:96), proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yang berkesinambungan, yaitu:

- a. Perumusan Agenda (Agenda Setting)
Pada tahap ini, isu-isu yang berkembang di masyarakat dipilih dan diprioritaskan untuk masuk ke agenda kebijakan pemerintah. Tidak semua masalah dapat langsung dijadikan kebijakan, karena adanya keterbatasan sumber daya dan perhatian politik.
- b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)
Setelah suatu isu masuk ke dalam agenda, tahap berikutnya adalah perumusan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, berbagai opsi atau strategi disusun untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi.
- c. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)
Tahap adopsi adalah saat pengambil keputusan yang memiliki kewenangan formal memilih salah satu alternatif kebijakan untuk dijadikan keputusan resmi.
- d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Implementasi merupakan tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan pelayanan publik.
- e. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus kebijakan, yang berfungsi menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Proses kebijakan publik merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Setiap tahap, mulai dari perumusan agenda hingga evaluasi, saling terkait dan menentukan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Proses kebijakan yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat,

dukungan sumber daya, koordinasi birokrasi, serta responsivitas terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya proses yang sistematis, kebijakan publik diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

3. Penanggulangan

Penanggulangan pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengatasi suatu permasalahan agar tidak semakin meluas serta dapat diminimalisir dampaknya. Istilah ini sering digunakan dalam konteks permasalahan sosial, kesehatan, maupun bencana, di mana penanggulangan tidak hanya bersifat reaktif (mengatasi masalah ketika terjadi), tetapi juga proaktif (mencegah agar masalah tidak muncul kembali di masa mendatang). Dengan kata lain, penanggulangan tidak hanya berhenti pada tindakan kuratif, melainkan juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif.

Menurut Soekanto (2016:57), penanggulangan adalah suatu tindakan yang mencakup pencegahan, pengendalian, dan pemulihan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga, maupun masyarakat secara bersama-sama. Pandangan ini menekankan bahwa penanggulangan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian proses yang berkesinambungan dan saling melengkapi.

Nugroho (2017:144) menegaskan bahwa penanggulangan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, artinya mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan (preventif), penanganan saat masalah terjadi (kuratif), hingga pemulihan dan pemberdayaan masyarakat (rehabilitatif). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan tidak hanya fokus pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hasil dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Purwanto dan Sulistyastuti (2015:89) menyatakan bahwa efektivitas penanggulangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Koordinasi Lintas Sektor
Masalah publik biasanya bersifat multidimensional, sehingga penanggulangannya tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama lintas lembaga dan sektor.
- b. Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan penanggulangan tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan.
- c. Ketersediaan Sumber Daya
Baik sumber daya manusia, dana, maupun sarana prasarana yang memadai agar program penanggulangan dapat berjalan sesuai rencana.
- d. Kebijakan yang Adaptif
Strategi penanggulangan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, politik, maupun ekonomi agar tetap relevan.

Sejalan dengan itu, Dunn (2018:131) menambahkan bahwa penanggulangan juga harus memperhatikan aspek monitoring dan evaluasi agar dapat diukur efektivitasnya. Tanpa evaluasi yang jelas, sulit untuk mengetahui apakah langkah-langkah penanggulangan benar-benar berhasil menekan permasalahan atau justru hanya memberikan solusi sementara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Penanggulangan yang baik harus berorientasi pada pencegahan, penanganan, serta pemulihan, disertai dukungan sumber daya yang memadai dan kebijakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

4. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang

tidak memadai, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun.

Secara sederhana, stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya. Namun, masalah stunting bukan hanya soal fisik, melainkan juga berhubungan dengan perkembangan otak, kecerdasan, produktivitas, hingga risiko penyakit kronis di masa dewasa.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018:7) stunting adalah salah satu masalah gizi kronis yang dialami oleh anak-anak, terutama pada usia balita. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usianya akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, serta pola asuh yang tidak. Masalah ini biasanya terjadi sejak janin masih berada dalam kandungan hingga usia dua tahun, yang dikenal sebagai periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Menurut World Health Organization (WHO, 2020), stunting merupakan salah satu bentuk malnutrisi yang paling umum di dunia dan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi hambatan fisik berupa tubuh pendek, tetapi juga gangguan perkembangan kognitif, menurunnya kemampuan belajar, rendahnya produktivitas ketika dewasa, bahkan peningkatan risiko penyakit degeneratif di kemudian hari.

Winarno (2015:102) menyatakan bahwa stunting tidak dapat dipandang sebagai persoalan kesehatan semata, melainkan juga merupakan masalah pembangunan. Hal ini karena stunting mencerminkan kondisi sosial ekonomi, pendidikan, pola konsumsi, sanitasi, serta lingkungan keluarga. Dengan kata lain, stunting adalah cerminan dari ketidakmampuan suatu sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara berkelanjutan.

Selain itu, UNICEF (2019) menjelaskan bahwa stunting merupakan indikator penting dari kualitas hidup anak dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan masih adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap pelayanan dasar. Oleh sebab itu, banyak negara, termasuk Indonesia, menempatkan penurunan angka stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Stunting juga memiliki dampak jangka panjang. Anak yang stunting berisiko mengalami penurunan kemampuan akademik, sulit bersaing di dunia kerja, dan pada akhirnya dapat memperkuat lingkaran kemiskinan antar-generasi. Nugroho (2017:89) menegaskan bahwa stunting adalah ancaman bagi pembangunan manusia karena generasi yang seharusnya produktif justru terhambat potensinya. Dengan demikian, masalah stunting bukan hanya menyangkut kesehatan anak, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.

Stunting tidak hanya ditandai dengan tubuh anak yang lebih pendek dari rata-rata usianya, tetapi juga membawa berbagai konsekuensi serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

a. Dampak Fisik

Anak yang mengalami stunting memiliki postur tubuh pendek dibandingkan anak seusianya. Namun, dampaknya tidak berhenti pada ukuran tubuh saja. Menurut WHO (2020), stunting dapat melemahkan sistem imun anak sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, anak stunting berisiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik, yang memengaruhi aktivitas fisik dan keterampilan dasar.

b. Dampak Kognitif

Stunting sangat erat kaitannya dengan gangguan perkembangan otak. UNICEF (2019) menjelaskan bahwa kekurangan gizi kronis

pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat menghambat pembentukan sel-sel otak dan jaringan saraf, sehingga kemampuan belajar anak menjadi rendah. Anak stunting cenderung memiliki daya konsentrasi lemah, kesulitan memahami pelajaran, dan prestasi akademik yang buruk di sekolah. Winarno (2015:112) menekankan bahwa stunting dapat mengurangi potensi intelektual anak secara permanen sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

c. Dampak Sosial-Ekonomi

Stunting bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan pembangunan negara. Menurut Nugroho (2017:93) anak-anak stunting ketika dewasa memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fisik dan intelektual yang menghambat mereka dalam bersaing di dunia kerja. Pada skala yang lebih luas, tingginya prevalensi stunting di suatu negara dapat menurunkan kualitas angkatan kerja, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan siklus kemiskinan antar-generasi.

d. Dampak Kesehatan Jangka Panjang

Selain dampak yang terlihat di usia anak, stunting juga menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Anak yang mengalami stunting lebih rentan menderita penyakit tidak menular di masa dewasa, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Hal ini karena gangguan metabolisme yang terjadi sejak masa kecil

dapat berlanjut hingga usia produktif. Dunn (2018:78) menjelaskan bahwa stunting memiliki keterkaitan erat dengan double burden of malnutrition atau beban ganda malnutrisi, di mana seseorang dapat mengalami kekurangan gizi di masa kecil dan kelebihan gizi (obesitas) di masa dewasa.

Stunting tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan sejak masa kehamilan hingga usia anak 2 tahun. Penyebab stunting dapat dibagi menjadi penyebab langsung, tidak langsung, hingga faktor sistemik yang lebih luas.

a. Penyebab Langsung

Menurut UNICEF (2019), terdapat dua penyebab langsung stunting, yaitu:

1) Asupan Gizi yang Tidak Memadai

Kekurangan zat gizi penting, terutama protein, zat besi, seng, vitamin A, dan yodium pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama atau makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang kurang bergizi berisiko lebih tinggi mengalami stunting.

2) Penyakit Infeksi Berulang

Penyakit seperti diare, ISPA, malaria, dan cacingan sering terjadi pada anak-anak. Infeksi ini menyebabkan tubuh sulit menyerap nutrisi dengan baik.

b. Penyebab Tidak Langsung

Subarsono (2016:51) menekankan bahwa faktor lingkungan keluarga dan masyarakat juga memengaruhi stunting, antara lain:

1) Pola asuh yang kurang tepat

Orang tua yang tidak memahami pentingnya gizi seimbang, kebersihan, serta perawatan kesehatan anak berpotensi menyebabkan gizi buruk. Misalnya, pemberian MP-ASI terlalu dini atau makanan yang tidak sesuai kebutuhan.

2) Akses terbatas terhadap pangan bergizi

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah membatasi kemampuan membeli makanan bergizi. Anak sering diberi makanan murah yang rendah protein dan vitamin.

3) Keterbatasan layanan kesehatan

Minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak memperbesar risiko stunting.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi aspek penting yang sering terabaikan, padahal sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Menurut Nugroho (2017:153) kondisi sanitasi yang buruk dan rendahnya akses air bersih dapat menyebabkan tingginya angka penyakit infeksi, terutama diare. Lingkungan yang tidak sehat juga mengurangi kualitas hidup anak dan keluarga secara keseluruhan.

d. Faktor Sosial-Ekonomi dan Budaya

1) Kemiskinan

Keluarga miskin cenderung tidak mampu menyediakan makanan bergizi dan akses layanan kesehatan yang memadai.

2) Pendidikan Orang Tua

Rendahnya tingkat pendidikan ibu berkorelasi dengan minimnya pengetahuan tentang gizi, pola asuh, dan kesehatan anak.

3) Faktor budaya dan kebiasaan

Di beberapa daerah, masih ada pantangan makanan bagi ibu hamil dan menyusui yang menyebabkan kekurangan gizi.

e. Faktor Sistemik

Menurut Dunn (2018:81) kebijakan publik juga berperan besar dalam menekan angka stunting. Lemahnya program intervensi gizi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta distribusi bantuan yang tidak merata dapat memperparah permasalahan stunting di masyarakat.

Secara keseluruhan, stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak luas pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan kualitas sumber daya manusia. Penyebabnya kompleks, meliputi faktor gizi, penyakit, pola asuh, lingkungan, sosial-ekonomi, dan kebijakan publik. Tingginya prevalensi stunting di Indonesia menekankan perlunya upaya penanggulangan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup anak dan mendukung pembangunan generasi yang sehat serta produktif.

5. Balai Penyuluh KB

Balai Penyuluh KB merupakan unit operasional di tingkat kecamatan yang berada di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Balai ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta kegiatan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat. Fungsi utama balai mencakup penyuluhan, pendampingan keluarga, pelayanan kontrasepsi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi tentang perencanaan keluarga serta gizi.

Balai Penyuluh KB berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga di tingkat kecamatan dan desa. Dalam praktiknya, balai tidak hanya menyampaikan informasi secara teori, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada keluarga, baik pasangan usia subur maupun keluarga yang berisiko mengalami permasalahan sosial dan kesehatan. Pendampingan ini dilakukan melalui kunjungan rumah, konsultasi, bimbingan pola asuh, serta pemantauan pertumbuhan anak. Hal ini menekankan pentingnya interaksi langsung antara penyuluh dan keluarga agar program dapat diterapkan secara nyata dan efektif.

Menurut Nugroho (2017:67), Balai Penyuluh KB melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Penyuluhan dan Edukasi
Memberikan informasi mengenai metode KB, kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan keluarga. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang sesuai kondisi sosial budaya masyarakat agar mudah diterima dan diaplikasikan.
- b. Pendampingan Keluarga

Membimbing pasangan usia subur dan keluarga dalam menggunakan metode KB serta meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan keluarga. Kegiatan ini termasuk konsultasi kesehatan ibu dan anak, bimbingan pola asuh, serta pemantauan status gizi anak.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Mencatat data keluarga, memantau pelaksanaan program KB, serta menilai efektivitas kegiatan penyuluhan. Balai juga mengidentifikasi keluarga yang memerlukan intervensi lebih intensif dan memastikan program berjalan sesuai rencana.

d. Pengembangan Kapasitas Penyuluh

Memberikan pelatihan dan pembekalan bagi penyuluh agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, memahami masalah keluarga, serta menyesuaikan strategi penyuluhan dengan kondisi masyarakat.

Keberadaan Balai Penyuluh KB sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana, karena balai menjadi pusat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lintas sektor. Melalui balai, program KB dan pembangunan keluarga dapat dijalankan secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Balai Penyuluh KB tidak hanya berfokus pada pengaturan jumlah anggota keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui bimbingan, edukasi, dan pendampingan yang sistematis.

Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) adalah unit operasional di tingkat kecamatan yang berada di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Balai ini berfungsi sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana dan sarana pendukung tugas dan fungsi Kepala UPT KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan membina petugas serta pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan, dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK tingkat kecamatan .

Sebagai pusat pengendali operasional, balai ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan program-program terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga di tingkat kecamatan.

Balai Penyuluh KB dikelola oleh tenaga profesional yang terdiri dari:

a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

PNS yang bertugas di tingkat desa/kelurahan untuk melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan program KKBPK bersama institusi masyarakat setempat.

b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

ASN atau non-ASN yang diangkat oleh pejabat berwenang dan berkedudukan di tingkat desa/kelurahan, memiliki tugas serupa dengan PKB namun lebih fokus pada pelaksanaan di lapangan.

c. Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program KB di tingkat desa.

d. Tim Pendamping Keluarga

Kelompok yang membantu dalam pendampingan keluarga dalam program-program terkait keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Dengan demikian, Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) memegang peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan program

Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Balai ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai KB dan pembangunan keluarga, tetapi juga sebagai pusat koordinasi dan pendampingan yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pasangan usia subur, keluarga, penyuluh, hingga institusi masyarakat setempat. Melalui kegiatan penyuluhan, pemantauan, bimbingan pola asuh, serta evaluasi dan pengolahan data, balai memastikan bahwa program yang dirancang oleh pemerintah dapat diterapkan secara nyata dan efektif di lapangan. Keberhasilan Balai Penyuluh KB sangat bergantung pada profesionalisme tenaga penyuluh, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sumber daya dan dukungan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, Balai Penyuluh KB berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di tingkat lokal maupun nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berpikir yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, fenomena, dan permasalahan penelitian. Melalui kerangka pemikiran, peneliti dapat menjelaskan dasar logis dari penelitian yang dilakukan serta menunjukkan arah analisis yang akan digunakan. Dengan demikian, kerangka pemikiran berfungsi sebagai pedoman dalam menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan teori yang relevan dan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini berangkat dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi dasar pelaksanaan program di daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah sebagai salah satu pelaksana utama dalam upaya penanggulangan stunting di tingkat kecamatan.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Dwiyanto Indiahono (2017: 31–34) Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana isi kebijakan disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, maupun kewenangan yang jelas.

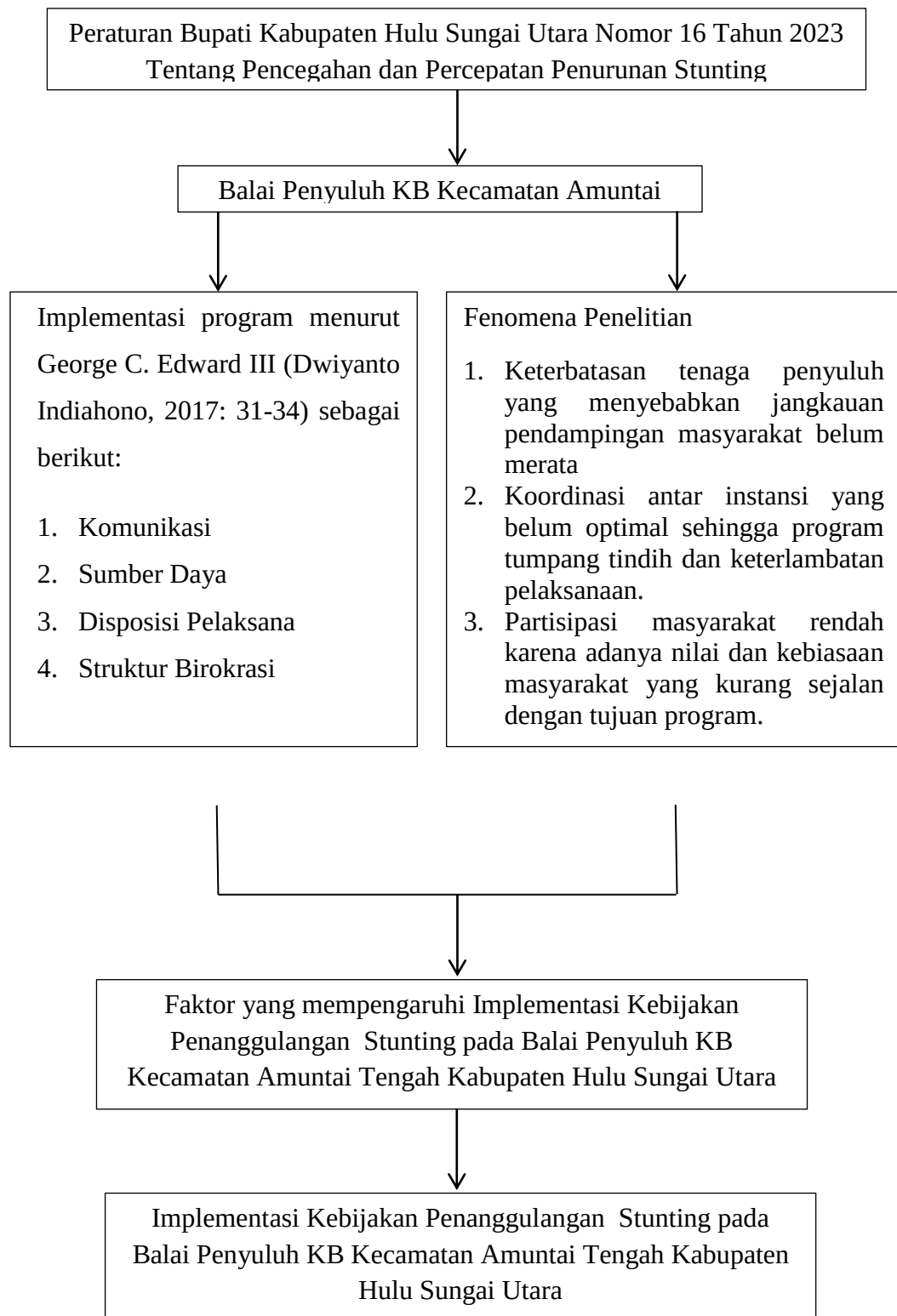
3. Disposisi Pelaksana

Mengacu pada sikap, komitmen, serta keseriusan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dukungan dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang efektif memerlukan SOP yang jelas, koordinasi yang baik, serta pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Balai Penyuluh KB ini beralamat di Jl. Negara Dipa No. 02, Sungai Malang, Amuntai Tengah, HSU, dengan koordinat GPS -2.494695, 115.2600506.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan praktik implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta interaksi antara petugas, kader KB, dan masyarakat penerima program.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, tipe deskriptif digunakan untuk menampilkan secara jelas bagaimana kebijakan penanggulangan stunting diterapkan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil oleh Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai Tengah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama yaitu:

- a. Data primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dilapangan yang bersumber dari jumlah keseluruhan narasumber.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Sesuai untuk penelitian deskriptif kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan penanggulangan stunting.

Dalam penelitian ini, informan terdiri atas sepuluh orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satu orang Kepala Balai KB yang berperan sebagai penanggung jawab program,
- b. Dua orang penyuluh KB yang melaksanakan fungsi penyampaian informasi serta pendampingan kepada masyarakat,
- c. Dua orang tenaga lapangan KB yang terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari,

- d. Dua orang kader masyarakat yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa,
- e. Tiga orang masyarakat penerima manfaat program yang menjadi sasaran utama kegiatan.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah uraian yang menjelaskan secara sistematis mengenai operasionalisasi variabel penelitian, yaitu bagaimana konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian diterjemahkan menjadi variabel, sub-variabel, indikator, serta fokus penelitian yang dapat diukur atau diamati.

Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan adalah implementasi program berdasarkan teori George C. Edward III (dalam Dwiyanto indiahono, 2017: 31-34) yang mencakup empat sub variabel yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana isi kebijakan disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, maupun kewenangan yang jelas.

3. Disposisi Pelaksana

Mengacu pada sikap, komitmen, serta keseriusan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dukungan dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang efektif memerlukan SOP yang jelas, koordinasi yang baik, serta pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Tabel 3. 1

Desain Operasional Penelitian

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Implementasi program menurut George C. Edward III (Dwiyanto Indiahono, 2017: 31-34)	1. Komunikasi	a. Penyampaian informasi program kepada masyarakat b. Pemahaman masyarakat terhadap isi program c. Keseragaman pesan dari penyuluh
		2. Sumber Daya	a. Ketersediaan tenaga penyuluh b. Kecukupan anggaran c. Fasilitas dan sarana pendukung kegiatan
		3. Disposisi Pelaksana	a. Keseriusan penyuluh dalam menjalankan tugas b. Sikap dalam menghadapi hambatan c. Keterbukaan terhadap masukan
		4. Struktur Birokrasi	a. Koordinasi antar instansi pelaksana b. Kejelasan alur kerja dan prosedur c. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan secara langsung untuk menggali informasi secara mendalam.

Menurut Sugiyono (2017:194), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, serta cocok untuk studi pendahuluan yang bertujuan menemukan permasalahan yang harus diteliti.”

Selain itu, Annisa Fitriani (2019:85) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa “Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal berupa tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi, yang sangat mengandalkan kreativitas pewawancara untuk mendapatkan hasil yang maksimal.”

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:203) Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Sedangkan Fitriani (2019:91) menyebutkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan

disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen tertulis maupun visual yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:240), Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, yang dapat berupa catatan harian, peraturan kebijakan, dan dokumen penting lainnya.

Sejalan dengan itu, Suwendra (2018:77) menjelaskan bahwa Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen berupa arsip resmi, laporan, data tertulis, maupun foto kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif, karena pada tahap ini peneliti mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang diperoleh agar menghasilkan temuan penelitian yang bermakna.

Menurut Sugiyono (2017:244), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Proses analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data dianggap jenuh. Tahap-tahap analisis data menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh masih bersifat mentah sehingga perlu diorganisasi agar siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dibuang agar analisis lebih terarah. Sugiyono menegaskan bahwa reduksi data bukan sekadar membuang data, tetapi juga menyusun data agar dapat ditarik kesimpulan dengan lebih mudah.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau gambar. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan, melihat pola hubungan, serta menentukan langkah analisis berikutnya.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan awal yang diperoleh dari data bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan secara berulang agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid, konsisten, dan sesuai dengan data lapangan.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini Meburut Sugiyono (2017) uji kredibilitas dilaksanakan melalui beberapa teknik berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan (Prolonged Engagement)

Peneliti membangun kedekatan dan kepercayaan dengan informan melalui kunjungan berulang ke Balai Penyuluh KB Kecamatan Amuntai. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan sampai informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang stabil (titik jenuh).

2. Ketekunan Pengamatan (Persistent Observation)

Peneliti melakukan pengamatan mendalam dan berfokus pada aspek-aspek kunci teori George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi). Catatan lapangan dibuat rinci untuk membedakan temuan utama dengan temuan perifer.

3. Triangulasi

Triangulasi dipakai untuk memeriksa konsistensi data dari berbagai sudut.

Penelitian ini menggunakan:

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan keterangan petugas Balai KB, kader KB/posyandu, dan keluarga penerima program.

b. Triangulasi Teknik

Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (laporan kegiatan, struktur organisasi, foto, notulen).

c. Triangulasi Waktu

Mengulang pengumpulan data pada waktu berbeda (mis. sebelum/sesudah kegiatan, hari berbeda) untuk melihat kestabilan informasi.

4. Member Check

Setelah transkrip/ikhtisar hasil wawancara disusun, peneliti melakukan member check dengan mengembalikan ringkasan temuan kepada informan kunci . Tujuannya untuk:

- a. Memastikan akurasi fakta/ucapan,
- b. Mengoreksi salah tafsir, dan
- c. Menambahkan informasi yang terlewat.

Perubahan/penegasan dari informan didokumentasikan sebagai bagian dari jejak audit.

5. Diskusi Sejawat (Peer Debriefing)

Peneliti mendiskusikan proses dan temuan sementara dengan dosen pembimbing atau rekan peneliti untuk menguji logika, konsistensi, dan kemungkinan bias. Masukan dari diskusi dicatat dan, bila relevan, diintegrasikan ke dalam analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ananda. (2023). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting melalui Balai Penyuluh KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai)
- Annisa, F. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anonim, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Anonim, Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Stunting
- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan Proposal Skripsi*. STIA Amuntai.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Badan pengembangan Bahasa dan Pembinaan
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Bangga Kencana*. Jakarta: BKKBN.
- Dini Febrian Anggreini. (2025). *Upaya Balai Keluarga Berencana Dalam Mendampingi Keluarga Anak Stunting di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
- Dunn, W. N. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- I Wayan, S. (2018). *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Nadia. (2023). *Implementasi Penanggulangan Stunting di Desa kapar Kecamatan batang Alai Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai)

- Notoatmodjo, S. (2017). *Ilmu kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Negara*. Makassar: Penerbit Nas Media.
- Tachjan. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD Press.
- UNICEF Indonesia. (2019). *Ringkasan Kebijakan: Pencegahan Stunting di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CAPS.